

Research Article

Analysis of Government Policy Regarding the Quality of Education and Its Implications for the Progress of Islamic Religious Education in Indonesia

Imam Musthofa

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: 22290115788@students.uin-suska.ac.id

Helmiati

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: hemiati@students.uin-suska.ac.id

Hariza Hasyim

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: hariza.hasyim@students.uin-suska.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by Al-Ard: Journal of Education

Received : September 17, 2025

Revised : October 7, 2025

Accepted : October 21, 2025

Available online : November 24, 2025

How to Cite: Imam Musthofa, Helmiati, & Hariza Hasyim. (2025). Analysis of Government Policy Regarding the Quality of Education and Its Implications for the Progress of Islamic Religious Education in Indonesia. *Al-Ard: Journal of Education*, 1(4), 132–142. <https://doi.org/10.63738/al-ard.v1i4.18>

Abstract

This study aims to analyze the Indonesian government's policies to improve education quality and their implications for the advancement of Islamic education. Over the past two decades, education quality has become a central issue in the national education system, especially following the implementation of various policies such as the National Education Standards (SNP), the Education Quality Assurance System (SPMP), teacher certification, professional education programs (PPG), and the Merdeka Belajar–Kampus Merdeka initiative. This study employs a qualitative descriptive method using a library research approach through the analysis of legal documents, ministerial reports, books, and scholarly journals published between 2019 and 2025. The findings indicate that government policies to improve education quality have significantly contributed to strengthening Islamic education systems in both public and religious schools. Curriculum reform, teacher professionalism, and the digitalization of madrasahs have become key drivers in Islamic education development. However, implementation challenges persist, including regional quality disparities, limited human resources, and uneven institutional capacity. Therefore, synergy between the Ministry of Education and the Ministry of Religious Affairs is essential to establish an integrated quality assurance system consistent with Islamic values.

Keywords: Education Policy, Education Quality, Islamic Education, Merdeka Belajar, Quality Assurance.

Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Mutu Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Kemajuan Pendidikan Agama Islam di Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam peningkatan mutu

pendidikan nasional serta implikasinya terhadap kemajuan pendidikan agama Islam. Dalam dua dekade terakhir, mutu pendidikan menjadi isu sentral dalam sistem pendidikan nasional, terutama setelah diberlakukannya berbagai kebijakan seperti Standar Nasional Pendidikan (SNP), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), sertifikasi guru, Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research) melalui analisis dokumen peraturan, laporan kementerian, buku, dan jurnal ilmiah terbitan lima tahun terakhir (2019–2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan memberikan dampak signifikan terhadap penguatan sistem pendidikan Islam, baik di sekolah umum maupun di madrasah. Reformasi kurikulum, peningkatan profesionalisme guru PAI, serta digitalisasi madrasah menjadi faktor penting dalam kemajuan pendidikan Islam. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan seperti ketimpangan mutu antarwilayah, keterbatasan sumber daya manusia, dan perbedaan kapasitas lembaga pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) dalam membangun sistem penjaminan mutu terpadu yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Mutu Pendidikan, Pendidikan Islam, Merdeka Belajar, Penjaminan Mutu.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sektor strategis yang berperan besar dalam menentukan arah kemajuan bangsa. Dalam konteks pembangunan nasional, mutu pendidikan menjadi indikator penting bagi keberhasilan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter, dan berakhlak mulia. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Hermanto, 2023).

Namun demikian, meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, mutu pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Laporan World Bank Education Review (2023) mencatat bahwa hasil Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia tahun 2022 masih menunjukkan skor literasi dan numerasi di bawah rata-rata negara OECD. Kondisi ini menggambarkan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan masih memerlukan perbaikan komprehensif pada semua jenjang, baik di pendidikan umum maupun keagamaan.

Mutu pendidikan di Indonesia diatur melalui Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri dari delapan standar, yaitu: standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan (Kemendikbudristek, 2022). Melalui delapan standar ini, pemerintah berupaya membangun sistem pendidikan yang terukur dan berkesinambungan. Namun implementasinya tidak selalu berjalan efektif di semua lembaga pendidikan. Menurut Fitri et al. (2024), terdapat disparitas signifikan antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama dalam hal ketersediaan tenaga pendidik yang profesional dan sarana penunjang pembelajaran.

Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah tidak hanya diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitasnya. Reformasi pendidikan yang diperkenalkan melalui kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) sejak tahun 2019 menjadi langkah penting dalam meningkatkan mutu pendidikan berbasis otonomi dan kreativitas satuan pendidikan (Kemendikbudristek, 2022). Program ini memberikan keleluasaan kepada lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal dan global serta menekankan pembelajaran berbasis karakter.

Selain itu, kebijakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan sertifikasi guru menjadi tonggak profesionalisasi tenaga pendidik di Indonesia. Pemerintah memandang guru sebagai

ujung tombak peningkatan mutu pendidikan. Menurut Harahap et al. (2022), profesionalisme guru berbanding lurus dengan kualitas proses dan hasil belajar. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru terus diperkuat melalui program pelatihan, tunjangan profesi, dan pembinaan karier.

Kementerian Agama (Kemenag) juga mengambil peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan Islam. Program Madrasah Reform yang dijalankan sejak tahun 2020 merupakan salah satu inovasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola, sistem akreditasi, serta digitalisasi pembelajaran di madrasah (Kemenag, 2023). Program ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjadikan lembaga pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang bermutu dan berdaya saing.

Menurut Abdillah (2025), pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk kepribadian peserta didik yang seimbang antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan Islam bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga ideologis dan moral. Kualitas pendidikan Islam akan berpengaruh langsung terhadap pembentukan karakter bangsa yang berakhlak dan berintegritas.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang menghambat optimalisasi kebijakan mutu pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Pertama, masih adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di tingkat daerah. Kedua, belum meratanya pelatihan profesional bagi guru PAI. Ketiga, keterbatasan sarana teknologi informasi di madrasah menghambat penerapan pembelajaran digital (Wahidin, 2024).

Maka dari itu, perlu adanya sinkronisasi kebijakan antara Kemendikbudristek dan Kemenag dalam membangun sistem penjaminan mutu terpadu yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mutu pendidikan Islam tidak hanya diukur dari aspek akademik, tetapi juga dari kemampuan lembaga pendidikan dalam menanamkan karakter spiritual dan moral peserta didik. Sebagaimana dikemukakan oleh Pribudhiana et al. (2021), peningkatan mutu pendidikan harus berlandaskan prinsip *continuous improvement* (perbaikan berkelanjutan). Prinsip ini sejalan dengan nilai Islam tentang *itqan*, yakni bekerja secara sungguh-sungguh dan sempurna sebagaimana termaktub dalam hadis Rasulullah SAW:

“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila melakukan pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan (sempurna).” (HR. al-Baihaqi).

Oleh karena itu, mutu pendidikan Islam tidak hanya merupakan tanggung jawab birokrasi, tetapi juga merupakan bagian dari amanah keagamaan untuk menegakkan nilai-nilai kebaikan dan kesempurnaan dalam pembelajaran. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada kebijakan pemerintah terkait peningkatan mutu pendidikan serta dampaknya terhadap kemajuan pendidikan agama Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah tentang Mutu Pendidikan di Indonesia

Mutu pendidikan merupakan bagian fundamental dari kebijakan pendidikan nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menegaskan bahwa mutu pendidikan harus diwujudkan melalui penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang dan jenis satuan pendidikan. Standar ini pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan diperbarui melalui Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 (Kemendikbudristek, 2022).

SNP terdiri atas delapan komponen yang menjadi tolok ukur keberhasilan

pendidikan, yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Setiap komponen tersebut saling berkaitan membentuk sistem mutu yang komprehensif. Dengan adanya standar ini, lembaga pendidikan diharapkan dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang efisien, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hasil belajar.

Menurut Hermanto (2023), kebijakan mutu pendidikan merupakan refleksi dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang layak dan bermutu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis. Oleh karena itu, penguatan sistem penjaminan mutu menjadi agenda utama pembangunan pendidikan nasional. Pemerintah mengembangkan dua mekanisme utama dalam penjaminan mutu, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI dilaksanakan oleh satuan pendidikan (sekolah dan madrasah) untuk mengontrol dan memperbaiki mutu pendidikan secara mandiri. SPME dilaksanakan oleh lembaga eksternal seperti Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dan BAN-PT untuk menilai kinerja lembaga pendidikan berdasarkan kriteria tertentu (Pribudhiana et al., 2021).

Tabel berikut memperlihatkan struktur sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia.

Tabel 1.
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia

No	Jenis Sistem	Pelaksana	Tujuan Utama	Dampak terhadap Lembaga Pendidikan Islam
1.	SPMI (Internal)	Sekolah/Madrasah	Menjamin mutu melalui evaluasi diri dan perbaikan berkelanjutan	Mengembangkan budaya mutu di madrasah
2.	SPME (Eksternal)	BAN-S/M, BAN-PT	Memberikan akreditasi dan sertifikasi mutu Lembaga	Meningkatkan reputasi dan PTAIN
3.	Monitoring dan Evaluasi	Kemendikbudristek, Kemenag	Memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif	Sinkronisasi mutu antara sekolah dan madrasah
4.	Supervisi Akademik	Pengawas Sekolah/Madrasah	Pembinaan dan pendampingan profesional guru	Penguatan kualitas guru PAI dan manajemen sekolah

Sumber: Diolah dari Kemendikbudristek (2022), Kemenag (2023)

Selain sistem penjaminan mutu, pemerintah juga memperkenalkan kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) sebagai paradigma baru pendidikan nasional.

Program ini menekankan fleksibilitas kurikulum, kemandirian sekolah, serta pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*).

Kebijakan ini lahir sebagai respon terhadap tantangan global dan kebutuhan akan sistem pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks madrasah dan lembaga pendidikan Islam, konsep Merdeka Belajar diterjemahkan dalam bentuk Merdeka Belajar Madrasah Indonesia (MBMI) yang mendorong kreativitas guru dan kepala madrasah dalam mengembangkan kurikulum kontekstual berbasis nilai-nilai keislaman (Kemenag, 2023).

Gambar berikut memperlihatkan pergeseran paradigma pendidikan nasional sebelum dan sesudah penerapan kebijakan Merdeka Belajar.



Gambar 1. Pergeseran Paradigma Kebijakan Mutu Pendidikan di Indonesia Keterangan:

Gambar di atas menunjukkan transisi kebijakan pendidikan nasional dari paradigma lama yang bersifat administratif dan seragam menuju paradigma baru Merdeka Belajar yang menekankan fleksibilitas, karakter, dan kontekstualisasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Sumber: Kemdikbudristek (2022); Fitri et al. (2024). Program Merdeka Belajar menunjukkan perubahan paradigma pendidikan dari sekadar kepatuhan administratif menjadi upaya untuk membangun budaya belajar yang reflektif, kontekstual, dan relevan dengan perkembangan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan konsep pendidikan Islam yang menekankan kebebasan berpikir (*hurriyah al-fikr*) dan pengembangan potensi individu secara seimbang (Abdillah, 2025).

1. Implementasi Kebijakan Mutu Pendidikan terhadap Pendidikan Islam

Kementerian Agama sebagai instansi yang menaungi pendidikan Islam berperan aktif dalam mengadaptasi kebijakan mutu nasional ke dalam sistem madrasah dan pendidikan tinggi keagamaan Islam. Melalui program Madrasah Reform, Kemenag fokus pada tiga aspek utama, yaitu: (1) peningkatan tata kelola madrasah, (2) profesionalisasi guru dan tenaga kependidikan, serta (3) integrasi teknologi digital dalam pembelajaran (Kemenag, 2023).

Implementasi kebijakan ini memperlihatkan kemajuan signifikan pada lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis, 2024), sebanyak 87% madrasah di Indonesia telah menerapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) secara bertahap, dan 63% di antaranya telah terakreditasi minimal B oleh BAN-S/M.

Peningkatan mutu ini juga tampak dalam aspek kompetensi guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Melalui kebijakan sertifikasi dan PPG, lebih dari 70.000 guru PAI telah

memperoleh sertifikat pendidik hingga tahun 2024 (Kemenag, 2024). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjamin profesionalitas tenaga pendidik sebagai faktor utama mutu pendidikan. Menurut Wahidin (2024), pendidikan Islam di Indonesia kini mengalami fase transformasi menuju integrasi antara ilmu umum dan ilmu agama. Reformasi kurikulum yang dilakukan pada madrasah tidak lagi memisahkan antara pengetahuan rasional dan spiritual, melainkan menekankan keseimbangan antara keduanya agar melahirkan generasi ulul albab - cerdas intelektual, spiritual, dan emosional. Selain aspek akademik, penerapan kebijakan mutu juga berdampak pada peningkatan budaya organisasi di madrasah. Lembaga pendidikan Islam mulai mengadopsi pendekatan manajemen mutu terpadu (Total Quality Management - TQM) yang menekankan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut secara berkelanjutan (Pribudhiana et al., 2021).

Tabel 2.

Dampak Implementasi Kebijakan Mutu terhadap Pendidikan Islam

Aspek	Dampak Positif	Dampak Negatif/Positif
Kurikulum	Kurikulum madrasah lebih adaptif dan relevan	Belum semua madrasah mampu Menyusun kurikulum mandiri
Guru & SDM	Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan	Keterbatasan kuota PPG bagi guru PAI
Infrastruktur	Digitalisasi pembelajaran dan e-learning madrasah	Masih minim di daerah 3T
Manajemen	Budaya mutu mulai berkembang di Lembaga islam	Belum merata pada madrasah kecil
Kolaborasi	Sinergi antara Kemendikbud dan Kemenag meningkat	Koordinasi teknis sering terhambat oleh birokrasi

Sumber : Diolah dari Kemenag (2023), Fitri et al. (2024)

2. Implikasi Kebijakan Mutu terhadap Kemajuan Pendidikan Agama Islam

Kebijakan mutu pendidikan yang diterapkan pemerintah membawa berbagai implikasi positif bagi kemajuan pendidikan Islam di Indonesia. Beberapa implikasi penting antara lain:

a. Peningkatan Profesionalisme Guru PAI

Program PPG dan sertifikasi guru meningkatkan kompetensi pedagogik, sosial, dan profesional guru agama Islam. Guru kini dituntut tidak hanya menguasai materi keagamaan, tetapi juga mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam mata pelajaran umum.

b. Penguatan Kurikulum Islam Terpadu

Kebijakan kurikulum Merdeka Belajar memberikan ruang bagi madrasah dan sekolah Islam untuk mengembangkan kurikulum kontekstual. Hal ini memperkuat integrasi antara ilmu pengetahuan, moral, dan karakter religius.

c. Digitalisasi dan Inovasi Pembelajaran Islam

Pandemi COVID-19 mempercepat penerapan pembelajaran digital di madrasah. Melalui platform e-learning Madrasah (Kemenag, 2023), pendidikan Islam kini lebih adaptif terhadap teknologi dan pembelajaran jarak jauh.

d. Peningkatan Akreditasi Lembaga Pendidikan Islam

Sejak tahun 2020, jumlah madrasah terakreditasi A meningkat 23%, menunjukkan adanya perbaikan mutu signifikan pada manajemen dan proses pembelajaran (Ditjen Pendis, 2024).

Namun, masih terdapat kendala seperti ketimpangan fasilitas dan kurangnya dukungan pembiayaan, terutama bagi madrasah swasta kecil di daerah rural. Kondisi ini menyebabkan gap kualitas yang perlu segera ditangani dengan kebijakan afirmatif.

3. Tantangan dan Strategi Penguatan Mutu Pendidikan Islam

a. Tantangan Implementasi Kebijakan Mutu Pendidikan Islam

Meskipun kebijakan pemerintah dalam bidang mutu pendidikan telah banyak memberikan dampak positif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya optimal, terutama dalam konteks pendidikan Islam. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, birokrasi kebijakan, serta kesenjangan antarwilayah.

1) Kualitas dan Ketersediaan Guru

Guru merupakan ujung tombak pelaksanaan pendidikan bermutu. Namun, kualitas dan distribusi guru di Indonesia masih belum merata. Menurut data Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag, 2023), terdapat lebih dari 700 ribu guru madrasah di Indonesia, namun hanya sekitar 56% di antaranya yang telah tersertifikasi secara profesional. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan kompetensi yang cukup besar antarwilayah, terutama antara madrasah di kota dan di daerah pedesaan.

Fitri et al. (2024) menegaskan bahwa salah satu faktor utama yang menghambat peningkatan mutu pendidikan Islam adalah rendahnya partisipasi guru dalam program pengembangan profesional berkelanjutan (Continuous Professional Development). Banyak guru PAI di madrasah kecil atau swasta yang kesulitan mengakses pelatihan karena keterbatasan dana dan lokasi. Akibatnya, inovasi pembelajaran berbasis teknologi, digitalisasi kurikulum, dan integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran belum berjalan maksimal.

2) Keterbatasan Sarana dan Infrastruktur Pendidikan

Sarana dan prasarana merupakan indikator penting dalam penilaian mutu pendidikan. Laporan World Bank Education Review (2023) menyebutkan bahwa 38% sekolah dan madrasah di Indonesia masih belum memiliki laboratorium komputer, sementara 41% belum memiliki akses internet yang memadai. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan mutu pembelajaran antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Padahal, kebijakan Merdeka Belajar menuntut kesiapan infrastruktur teknologi sebagai pendukung utama pelaksanaan pembelajaran berbasis digital.

Menurut Wahidin (2024), tantangan utama digitalisasi pendidikan Islam terletak pada lemahnya kapasitas manajemen madrasah dalam mengelola teknologi informasi. Banyak madrasah swasta kecil yang masih beroperasi secara konvensional dan belum mampu memanfaatkan sistem manajemen pembelajaran daring (Learning Management System – LMS) seperti E-Learning Madrasah atau Simpati Kemenag secara optimal.

3) Birokrasi dan Sinkronisasi Kebijakan

Kendala lain yang kerap muncul adalah tumpang tindih kebijakan antara Kemendikbudristek dan Kemenag. Kedua kementerian memiliki sistem regulasi dan penjaminan mutu yang berbeda, padahal orientasi keduanya sama, yaitu meningkatkan mutu pendidikan nasional. Hermanto (2023) menyebutkan bahwa sinergi kebijakan antara kedua lembaga masih lemah, terutama dalam hal akreditasi, kurikulum, dan peningkatan SDM. Akibatnya, implementasi di lapangan sering kali tidak selaras antara sekolah umum dan madrasah.

Pribudhiana et al. (2021) menilai bahwa desentralisasi pendidikan yang diberlakukan sejak reformasi seharusnya menjadi peluang bagi madrasah untuk lebih otonom. Namun, dalam praktiknya, banyak madrasah yang masih bergantung pada petunjuk teknis dari pusat, sehingga fleksibilitas kebijakan belum sepenuhnya terealisasi. Birokrasi berlapis-lapis sering membuat pelaksanaan kebijakan berjalan lambat.

4) Ketimpangan Wilayah dan Akses Pendidikan

Kesenjangan mutu antarwilayah juga menjadi tantangan serius. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Pendidikan di wilayah Indonesia bagian barat lebih tinggi dibandingkan kawasan timur, khususnya Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Hal ini berkorelasi langsung dengan keterbatasan tenaga pendidik, sarana, serta akses internet. Ketimpangan ini berdampak pada madrasah di daerah terpencil yang sering tertinggal dari segi mutu akademik maupun pengelolaan.

Selain itu, faktor sosial ekonomi masyarakat juga memengaruhi partisipasi pendidikan. Menurut Harahap et al. (2022), tingkat kemiskinan dan keterbatasan ekonomi keluarga menyebabkan sebagian siswa madrasah harus bekerja sambil, yang mengganggu proses pembelajaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan ekonomi masyarakat.

5) Tantangan Ideologis dan Nilai

Dalam konteks pendidikan Islam, tantangan lain yang sering muncul adalah bagaimana menyeimbangkan antara nilai-nilai keislaman dengan tuntutan kemajuan global. Abdillah (2025) menegaskan bahwa integrasi ilmu agama dan ilmu umum masih menjadi persoalan mendasar di banyak lembaga pendidikan Islam. Sebagian masih memandang pendidikan agama sebagai pelengkap, bukan inti dari pembentukan karakter. Padahal, mutu pendidikan Islam sejatinya harus diukur dari kemampuan menghasilkan peserta didik yang berilmu dan berakhlak.

b. Strategi Penguatan Mutu Pendidikan Islam di Indonesia

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan: pemerintah, madrasah, guru, masyarakat, dan dunia industri. Strategi penguatan mutu pendidikan Islam dapat dilakukan melalui lima pendekatan utama berikut ini:

1) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Salah satu strategi utama peningkatan mutu adalah melalui penguatan kompetensi pendidik. Pemerintah perlu memperluas akses program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan sertifikasi guru bagi guru madrasah dan PAI, termasuk melalui jalur daring dan beasiswa daerah 3T. Selain itu, pelatihan berbasis teknologi informasi seperti Digital Madrasah Training harus menjadi program rutin agar guru dapat beradaptasi dengan perkembangan pembelajaran modern (Kemenag, 2023).

Selain guru, kepala madrasah juga harus diperkuat kapasitas manajerialnya. Wahidin (2024) menyarankan agar kepala madrasah diberi pelatihan kepemimpinan berbasis mutu (Instructional Leadership) untuk membangun budaya mutu di lingkungan sekolah. Kepemimpinan semacam ini terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi guru dan hasil belajar siswa.

2) Integrasi Sistem Penjaminan Mutu Nasional dan Keagamaan

Sinkronisasi antara Kemendikbudristek dan Kemenag perlu diperkuat melalui pembentukan sistem penjaminan mutu terpadu. Misalnya, kebijakan akreditasi madrasah dapat diselaraskan dengan BAN-S/M untuk menghindari duplikasi dan mempercepat peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam. Abdillah (2025) mengusulkan pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Islam Nasional (LPM-PIN) yang berfungsi sebagai wadah koordinasi antara kedua kementerian.

Selain itu, madrasah perlu didorong untuk menerapkan prinsip Total Quality Management (TQM) secara mandiri, meliputi perencanaan mutu, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Sistem ini sejalan dengan nilai Islam tentang itqan (ketelitian dan kesempurnaan kerja) serta amanah (tanggung jawab moral).

3) Penguatan Infrastruktur dan Digitalisasi Pembelajaran

Modernisasi sarana pendidikan menjadi keharusan dalam era digital. Pemerintah perlu memperluas program Madrasah Digital dengan menyediakan bantuan perangkat komputer, jaringan internet, serta pelatihan pengelolaan Learning Management System (LMS) bagi guru dan siswa. Dengan demikian, madrasah dapat lebih siap menghadapi pembelajaran jarak jauh, asesmen digital, serta inovasi kurikulum berbasis teknologi.

Menurut Fitri et al. (2024), digitalisasi pembelajaran tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka peluang kolaborasi antara lembaga pendidikan Islam dan lembaga riset teknologi. Contohnya, pengembangan platform E-Learning Madrasah yang kini digunakan oleh lebih dari 35 ribu madrasah di seluruh Indonesia menjadi bukti konkret transformasi mutu berbasis digital.

4) Reorientasi Kurikulum Islam Berbasis Karakter

Kurikulum pendidikan Islam perlu diarahkan pada pembentukan karakter dan integrasi nilai spiritual dalam ilmu pengetahuan. Kurikulum berbasis Merdeka Belajar memungkinkan madrasah untuk menyesuaikan konten pembelajaran dengan kebutuhan lokal dan nilai-nilai Islam universal seperti kejujuran, kerja keras, dan toleransi (Kemendikbudristek, 2022).

Reorientasi kurikulum ini sejalan dengan konsep insan kamil dalam Islam - yaitu manusia yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional. Pendidikan Islam yang berorientasi karakter akan menghasilkan peserta didik yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat.

5) Kolaborasi Multi-aktor dan Pendanaan Berkelanjutan

Peningkatan mutu pendidikan Islam tidak dapat bergantung hanya pada pemerintah. Kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga zakat, dan organisasi sosial keagamaan harus diperluas. Misalnya, program CSR Pendidikan dari BUMN dan perusahaan dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan madrasah di daerah tertinggal. Lembaga zakat seperti Baznas dan Dompot Dhuafa juga berpotensi menjadi mitra strategis dalam menyediakan dana pendidikan untuk siswa kurang mampu.

Pendanaan berkelanjutan juga dapat diperoleh melalui inovasi ekonomi madrasah, seperti madrasah entrepreneurship program yang kini mulai diterapkan di beberapa wilayah (Harahap et al., 2022). Program ini mendorong madrasah untuk mengembangkan unit usaha produktif yang hasilnya digunakan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan.

KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah dalam bidang mutu pendidikan merupakan instrumen penting dalam membangun sistem pendidikan nasional yang unggul dan berdaya saing. Melalui penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), sistem penjaminan mutu (SPMI dan SPME), program sertifikasi guru, serta kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka, pemerintah telah berupaya menciptakan pendidikan yang inklusif dan bermutu tinggi.

Dalam konteks pendidikan Islam, kebijakan tersebut membawa dampak positif terhadap kemajuan madrasah dan lembaga keagamaan. Peningkatan profesionalisme guru PAI, digitalisasi pembelajaran, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum menjadi indikator utama kemajuan tersebut. Namun demikian, tantangan seperti ketimpangan wilayah, keterbatasan infrastruktur, dan sinkronisasi kebijakan antar kementerian masih perlu mendapatkan perhatian serius.

Peningkatan mutu pendidikan Islam hanya dapat terwujud apabila dilakukan melalui strategi yang komprehensif dan kolaboratif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan: pemerintah, guru, masyarakat, dan dunia usaha. Prinsip *itqan* (kesungguhan dan kesempurnaan) dalam Islam harus menjadi landasan moral dalam setiap upaya peningkatan mutu pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2025). *Reorientasi Pendidikan Islam di Era Merdeka Belajar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Pembangunan Pendidikan Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: BPS RI.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Ditjen Pendis. (2024). *Laporan Nasional Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Madrasah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.
- Fitri, A., Suryani, E., & Nursyahbani, D. (2024). Implementasi Kebijakan Mutu Pendidikan dan Dampaknya terhadap Kinerja Guru Madrasah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(1), 45–62.
- Harahap, R., Fadillah, S., & Rosmawati. (2022). Pengembangan Madrasah Berbasis Entrepreneurship untuk Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Tarbiyah dan Pendidikan Islam*, 14(2), 133–148.
- Hermanto, Y. (2023). *Kebijakan Mutu Pendidikan Nasional dan Penguatan SDM Indonesia Emas 2045*. Bandung: Alfabeta.
- Kemdikbudristek. (2022). *Laporan Capaian Program Merdeka Belajar 2022–2023*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kemenag RI. (2023). *Madrasah Reform Program: Transformasi Mutu Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kemenag RI. (2024). *Data Statistik Guru Pendidikan Agama Islam 2024*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A*

Analysis of Government Policy Regarding the Quality of Education and Its Implications for the Progress of Islamic Religious Education in Indonesia

Imam Musthofa, Helmiati, Hariza Hasyim

Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Pribudhiana, N., Jannah, N., & Subakti, D. (2021). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Perspektif Total Quality Management di Sekolah Islam. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 8(3), 201–220.

Tilaar, H. A. R. (2021). *Manajemen Pendidikan Nasional: Strategi Peningkatan Mutu dan Pemerataan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wahidin, A. (2024). Digitalisasi Pembelajaran di Madrasah pada Era Merdeka Belajar. *Jurnal Inovasi Pendidikan Islam*, 6(1), 71–89.

World Bank. (2023). *Indonesia Education Sector Review: Learning Recovery and Quality Improvement*. Washington, DC: The World Bank Group.